



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DENPASAR KELAS I A**

**TRIWULAN III
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN SURVEI
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI
PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DENPASAR KELAS I A**

**Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah**

Disahkan di Denpasar
Pada hari : Selasa, 1 Oktober 2024


Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A,

Nyoman Wiguna,
NIP. 19701220 199603 1 002

Ketua Tim Survei,

Made Oka Sarasmijaya
NIP. 19860515 201101 1 021

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud Dan Tujuan	4
1.3. Landasan Hukum	5
1.4. Rencana Kerja.....	5
BAB II	7
METODOLOGI	7
2.1. Metode Penelitian.....	7
2.2. Populasi Dan Sampel.....	7
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	7
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	7
2.5. Teknik Analisis Data.....	8
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	8
BAB III	10
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	10
3.1. Profil responden	10
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	13
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	23
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	24
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan.....	25
4.2. Rekomendasi	25
Lampiran.....	25

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data

minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

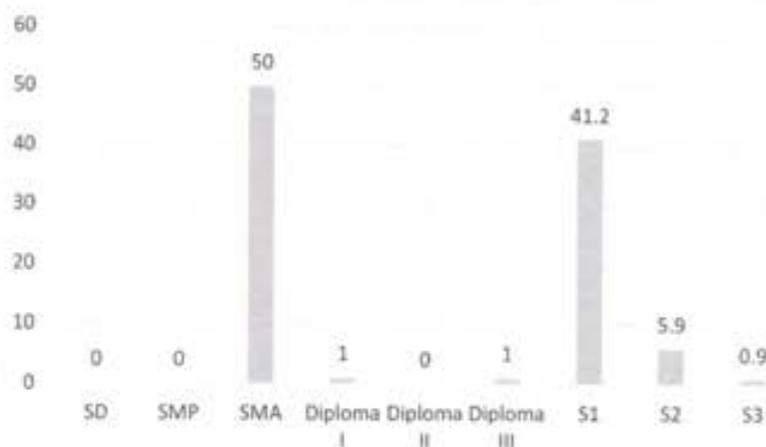
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar tingkat SMA sebesar 50%.

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden
Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	0	0.0	0.0	0.0
	SMP	0	0.0	0.0	0.0
	SMA	51	50.0	50.0	50.0
	Diploma I	1	1.0	1.0	51.0
	Diploma II	0	0.0	0.0	51.0
	Diploma III	1	1.0	1.0	52.0
	S1	42	41.2	41.2	93.2
	S2	6	5.9	5.9	99.1
	S3	1	0.9	0.9	100.0
	Total	102	100	100	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden

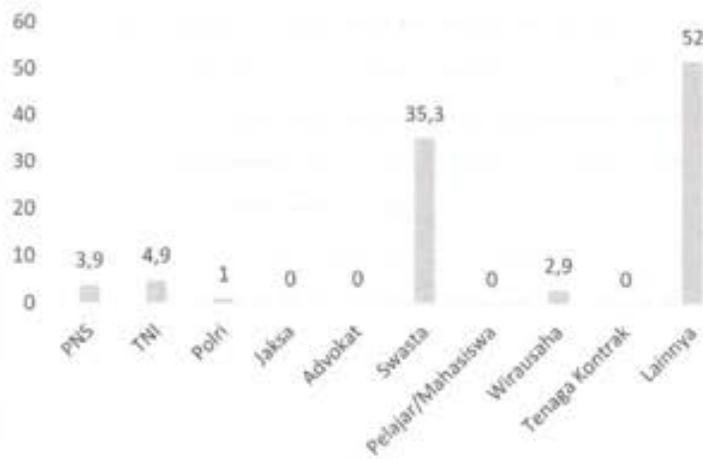
3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 52% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai kategori Lainnya .

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden
Pekerjaan Utama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	4	3.9	3.9	3.9
	TNI	5	4.9	4.9	8.8
	Polri	1	1.0	1.0	9.8
	Jaksa	0	0.0	0.0	9.8
	Advokat	0	0.0	0.0	9.8
	Swasta	36	35.3	35.3	45.1
	Pelajar/Mahasiswa	0	0.0	0.0	45.1
	Wirausaha	3	2.9	2.9	48.0
	Tenaga kontrak	0	0.0	0.0	48.0
	Lainnya	53	52.0	52.0	100
	Total	102	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden

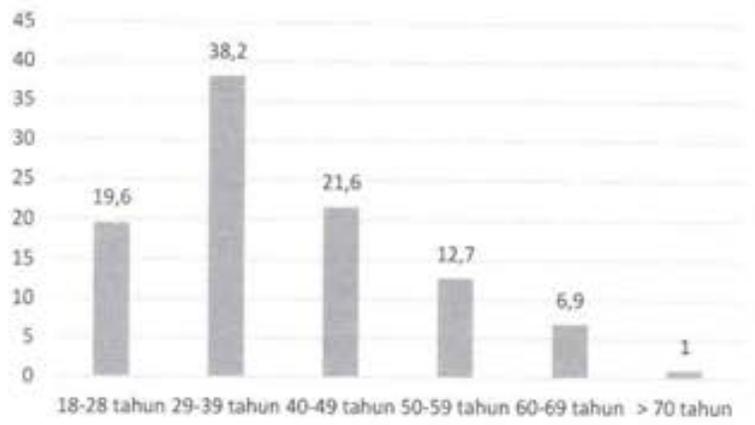
3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia 29 s/d 39 tahun sebesar 38.2%.

Tabel 6.
Usia Responden
Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-28 tahun	20	19.6	19.6	19.6
	29-39 tahun	39	38.2	38.2	57.8
	40-49 tahun	22	21.6	21.6	79.4
	50-59 tahun	13	12.7	12.7	92.1
	60-69 tahun	7	6.9	6.9	99.0
	> 70 tahun	1	1.0	1.0	100
	Total	102	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 3. Usia responden

3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

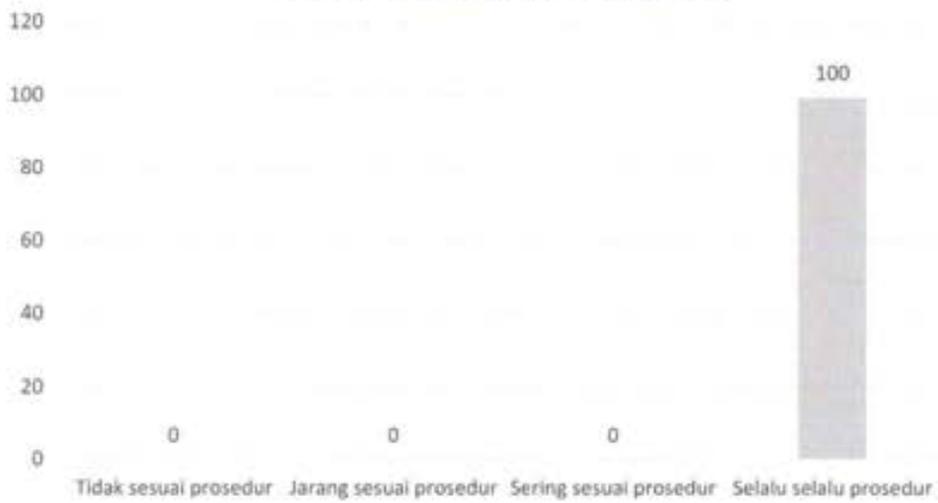
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 7.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan
Manipulasi Peraturan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak sesuai prosedur	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang sesuai prosedur	0	0.0	0.0	0.0
	Sering sesuai prosedur	0	0.0	0.0	0.0
	Selalu selalu prosedur	102	100.0	100.0	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 4. Manipulasi Peraturan



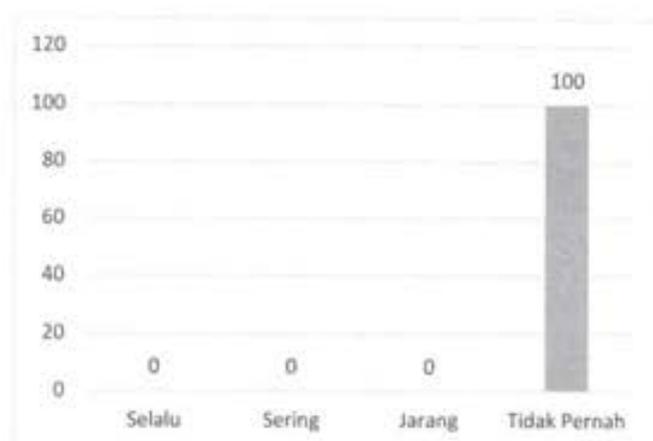
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.000 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 8.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

		Penyalahgunaan Jabatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Tidak Ada	102	100.0	100.0	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 5. Penyalahgunaan Jabatan

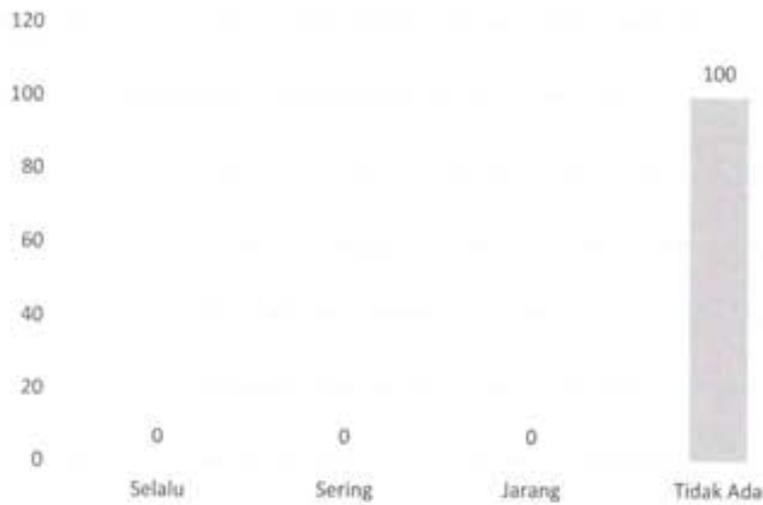
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.000, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 9.
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh
Menjual Pengaruh

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Tidak Ada	102	100.0	100.0	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 6. Menjual Pengaruh

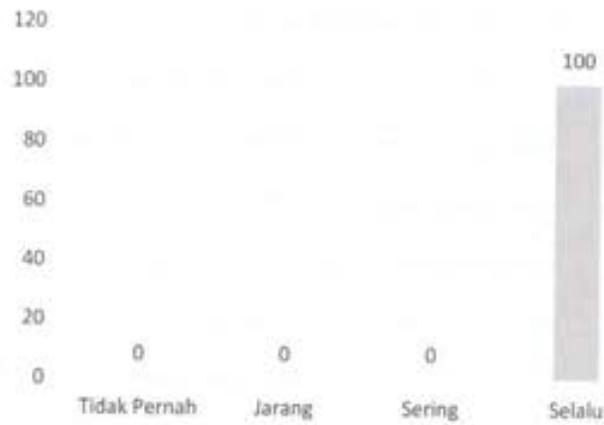
3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.000, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 10.
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya
Transparansi Biaya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Selalu	102	100.0	100.0	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 7. Transparansi Biaya

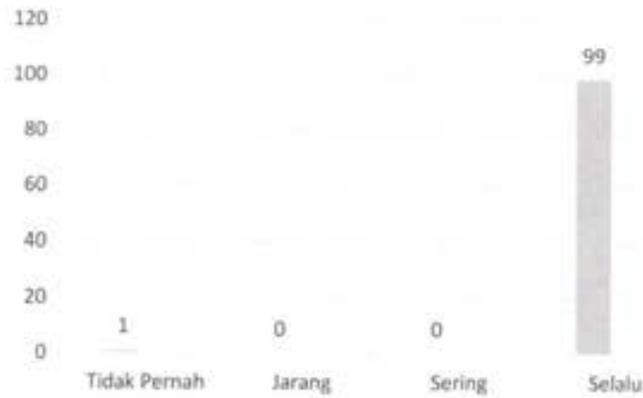
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3.971 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 11.
Indeks pada Indikator Tambahan Biaya
Biaya Tambahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	1	1.0	1.0	1.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Selalu	101	99.0	99.0	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 9. Tambahan Biaya

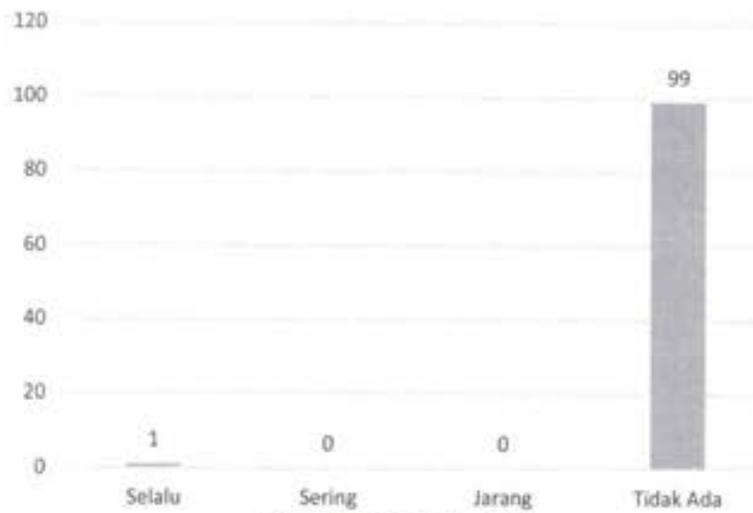
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3.971 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 12.
Indeks pada Indikator Hadiah
Hadiah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	1	1.0	1.0	1.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Tidak Ada	101	99.0	99.0	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 10. Hadiah

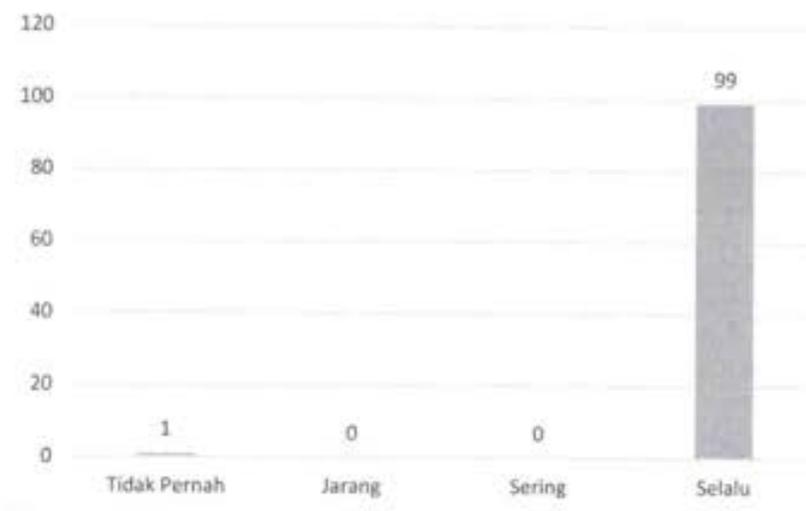
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3.971. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 13.
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran
Transaparansi Pembayaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	1	1.0	1.0	1.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Selalu	101	99.0	99.0	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 11. Transparansi Pembayaran

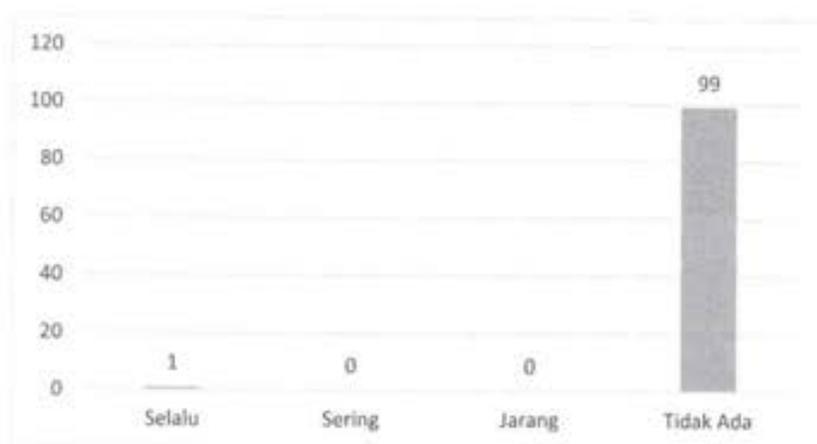
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3.971. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 14.
Indeks pada Indikator Percaloan
Percaloan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	1	1.0	1.0	1.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Tidak Ada	101	99.0	99.0	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 12. Percaloan

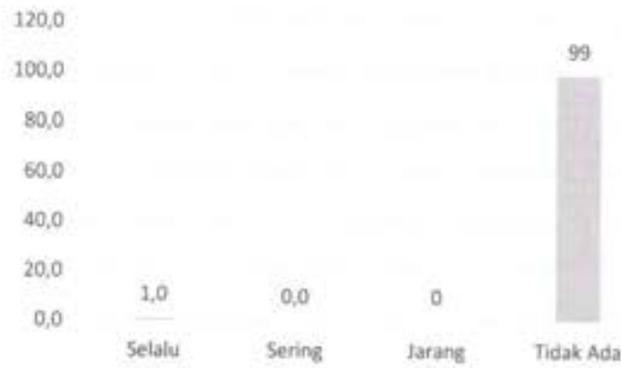
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3.971. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 15.
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang
Perbuatan Curang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	1	1.0	1.0	1.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Tidak Ada	101	99.0	99.0	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 13. Perbuatan Curang

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3.971. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar Bersih dari Korupsi.

Tabel 16.
Tabel Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia
Transaksi Rahasia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu	1	1.0	1.0	1.0
	Sering	0	0.0	0.0	0.0
	Jarang	0	0.0	0.0	0.0
	Tidak Ada	101	99.0	99.0	100.0
	Total	102	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 8. Transaksi Rahasia

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Denpasar sebesar 3,98/99,56%

Tabel 17.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Denpasar

No	Ruang lingkup	Nilai Rata-rata
1	Manipulasi Peraturan	4,000
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000
3	Menjual Pengaruh	4,000
4	Transparansi Biaya	4,000
5	Biaya Tambahan	3,971
6	Hadiah	3,971
7	Transparansi Pembayaran	3,971
8	Percaloan	3,971
9	Perbuatan Curang	3,971
10	Transaksi Rahasia	3,971

Indeks 3,98/99,56% tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai

interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 - 100

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan
Negeri Denpasar

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Denpasar.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Denpasar diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Denpasar memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,98/99.56% atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.971
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.971
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3.971
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.971
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.971
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.971

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Denpasar pada Triwulan III Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks di atas 3,98/99.56% atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator biaya tambahan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya, disusul dengan indikator hadiah dan transparansi pembayaran. Oleh karenanya peningkatan pelayanan dengan inovasi-inovasi terbaru lainnya diperlukan untuk itu.

102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah	408	408	408	408	405	405	405	405	405	405	
NRR per RL	4,000	4,000	4,000	4,000	3,971	3,971	3,971	3,971	3,971	3,971	
NRR Tertimbang	0,400	0,400	0,400	0,400	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	3,982 *)
IPK Unit Pelayanan											99,56 **)

Keterangan :

- RL = Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per RL = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per ruang lingkup x 0.111

IPK UNIT PELAYANAN : 99,56
Kategori: BERSIH DARI KORUPSI

Mutu :

- 1 (Tidak bersih dari korupsi)** : 1,00 - 1,75 : 25 - 43,75
- 2 (Kurang bersih dari korupsi)** : 1,76 - 2,50 : 43,76 - 62,50
- 3 (Cukup bersih dari korupsi)** : 2,51 - 3,25 : 62,51 - 81,25
- 4 (Bersih dari korupsi)** : 3,26 - 4,00 : 81,26 - 100,00

by: dianplus - phone +6281804181947

Tabel

RINGKASAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Indeks Persepsi Korupsi:
99,56 Kategori: BERSIH DARI KORUPSI

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4,000	Sangat Baik	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Sangat Baik	1
3	Menjual Pengaruh	4,000	Sangat Baik	1
4	Transparansi Biaya	4,000	Sangat Baik	1
5	Biaya Tambahan	3,971	Sangat Baik	5
6	Hadiah	3,971	Sangat Baik	5
7	Transparansi Pembayaran	3,971	Sangat Baik	5
8	Percaloan	3,971	Sangat Baik	5
9	Perbuatan Curang	3,971	Sangat Baik	5
10	Transaksi Rahasia	3,971	Sangat Baik	5

